



ABSTRAK

Urgensi memahami peran pemerintah dalam tata kelola mengenai air limbah domestik menjadi fokus penelitian ini. Hal ini dikarenakan pengelolaan air limbah domestik sangat berpengaruh pada sanitasi lingkungan dan secara luas pada kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, pengelolaan air limbah domestik juga akan berimplikasi pada kualitas air untuk sumber air. Untuk memahami peran pemerintah dalam tata kelola air limbah, penelitian ini menggunakan kerangka *water governance* dengan indikator, yaitu konten, kelembagaan, dan relasional untuk melihat sejauh mana implementasi dari tata kelola air limbah domestik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu studi kasus. Metode tersebut dipilih untuk memfokuskan penelitian sehingga lebih mendalam dengan tempat penelitian di IPAL Sewon. IPAL Sewon dipilih karena menjadi satu-satunya IPAL Regional di D.I.Yogyakarta dengan tiga wilayah Kabupaten/Kota yang turut mengalirkan air limbah domestik mereka. Kabupaten/Kota tersebut, yaitu Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul.

Melalui indikator tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi kegagalan dalam implementasi *water governance* pada pengelolaan air limbah domestik. Hal ini dikarenakan adanya kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait dengan pengelolaan air limbah di IPAL Sewon menunjukkan korelasi yang kurang bersinergi meskipun sudah terdapat Perjanjian Kerja Sama (PKS). Selain itu, keberhasilan pengelolaan air limbah domestik juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik di IPAL Sewon juga masih tergolong rendah, sementara dalam tata kelola ini masih didominasi oleh aktor negara.

Kata kunci: *water governance; air limbah domestik; IPAL Sewon.*



ABSTRACT

The urgency of understanding the role of government in domestic wastewater governance is the focus of this study. This is because domestic wastewater management greatly affects environmental sanitation and by extension, the welfare of the community. In addition, domestic wastewater management will also have implications on water quality for water sources. To understand the role of government in wastewater governance, this study utilizes the water governance framework with indicators, namely content, institutional, and relational to see the extent of implementation of domestic wastewater governance. The method used in this research is a case study. The method was chosen to focus the research so that it is more in-depth with the research site at Sewon WWTP. Sewon WWTP was chosen because it is the only regional WWTP in D.I.Yogyakarta with three regencies/cities that also drain their domestic wastewater. These regencies/cities are Sleman Regency, Yogyakarta City, and Bantul Regency.

Through these indicators, the research results show that there is a failure in the implementation of water governance in domestic wastewater management. This is because the authority between the Provincial and Regency/City Governments related to wastewater management at Sewon WWTP shows a correlation that lacks synergy despite the existence of a Cooperation Agreement (PKS). In addition, the success of domestic wastewater management is also related to community participation. Community participation in domestic wastewater management at Sewon WWTP is also still relatively low, while in this governance it is still dominated by state actors.

Keywords: *water governance; domestic wastewater; Sewon WWTP.*